

SOSIALISASI MODEL REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI

Ratnia Solihah¹, Dede Sri Kartini², Ari Ganjar Herdiansah³

^{1,2,3}Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

*Korespondensi: ratnia91@gmail.com

ABSTRACT

The problems that have occurred in political parties during the reformation period, one of which is triggered by problems in the management of political parties, both related to the leadership crisis of political parties, internal conflicts of political parties, the phenomenon of candidates/candidates in the election contestation that leads to dynastic politics or the phenomenon of candidates single, lack of capacity of elected legislators in carrying out legislative functions, budgeting and controlling functions; and in carrying out their duties as representatives of the people. The internal and external problems of the party were caused by the recruitment and regeneration process of political parties carried out by political parties that did not go well. Following up on these problems, the PPM team socialized the recruitment and regeneration model of political parties whose implementation was integrated with Unpad Virtual Integrative KKN activities. PPM activities are carried out in the form of socializing the recruitment and cadre model of Political Parties which in its implementation is enriched with socialization of recruitment and regeneration of Social Organizations, especially HMI to provide more understanding and knowledge for the target subjects of PPM, namely political activists, youth and students in the area where students live. who participated in the PPM for lecturers and students in Unpad.

Keywords: socialization; recruitment model; regeneration; political parties

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi pada partai-partai politik selama ini di masa reformasi, salah satunya dipicu oleh permasalahan manajemen partai politik, baik terkait krisis kepemimpinan partai politik, konflik internal partai politik, fenomena calon/kandidat dalam kontestasi pilkada yang mengarah pada politik dinasti atau fenomena calon tunggal, kurangnya kapasitas anggota legislatif terpilih dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan (*controlling*); serta dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Persoalan internal dan eksternal partai tersebut disebabkan oleh proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang dilakukan partai politik tidak berjalan dengan baik. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, tim PPM melakukan sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang pelaksanaannya terintegrasi dengan kegiatan KKN Integratif Virtual Unpad. Kegiatan PPM dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi model rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik yang dalam implementasinya diperkaya dengan sosialisasi rekrutmen dan kaderisasi Organisasi Kemasyarakatan, khususnya HMI untuk lebih memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi sasaran subyek PPM yaitu kalangan aktivis politik, pemuda dan mahasiswa di lingkungan wilayah tempat tinggal mahasiswa yang ikut serta dalam PPM dosen maupun mahasiswa di lingkungan Unpad.

Kata Kunci: sosialisasi; model rekrutmen; kaderisasi; partai politik

PENDAHULUAN

Pada masa reformasi ini, partai politik memiliki citra yang kurang baik di mata publik. Survei dari Pusat Riset Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan tingkat kepercayaan publik

terhadap demokrasi masih besar. Namun, dalam survei yang sama, kepercayaan publik terhadap partai politik relatif terpuruk (Agung, 2018). Survei LIPI ini dilakukan pada 19 April-5 Mei 2018 di 34 provinsi dengan 2.100 responden. Hasil survey menunjukkan bahwa

sentimen positif terhadap demokrasi ternyata tidak diikuti oleh kepercayaan publik terhadap partai politik. ini berarti masyarakat Indonesia setuju akan demokrasi, tapi tidak begitu yakin dengan partai politik. Kondisi tersebut muncul diduga akibat performa partai politik di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat.

Selain itu, penurunan simpati atau kepercayaan publik terhadap partai politik tercermin dalam sejumlah temuan hasil survey lainnya yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, antara lain Skala Survey Indonesia (2011), Lembaga Survei Cirus *Surveyors Groups* (2013), *Saiful Mujani Research and Consulting* (2015), dan Lembaga survei Indonesia (2016) yang menyimpulkan terjadinya penurunan kepercayaan publik terhadap partai politik sejak tahun 2001 hingga tahun 2016. Menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik tersebut disebabkan beberapa fenomena lemahnya kelembagaan partai politik, antara lain maraknya masalah pelanggaran hukum (Aspan, 2020), seperti kasus korupsi, suap menyuap, jual beli jabatan publik melalui pejabat partai politik, penyalahgunaan wewenang dan jabatan politik untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, konflik kekuasaan di internal partai politik, penyalahgunaan narkoba oleh politisi partai politik, dan permasalahan lainnya.

Persoalan lainnya yang terkait dengan peran partai politik adalah ketidakmampuan partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan optimal. Partai-partai politik tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun dalam menghubungkan warga negara dengan pemerintahan (Romli, 2011: 200). Makna kehadiran partai politik seolah-olah datang dan pergi, ada dan hadir hanya pada saat menjelang pemilu, baik pada pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Partai politik hanya terasa keberadaanya selama masa kampanye politik periodik dan pada momen-momen tersebut. Selebihnya tidak tampak bagaimana partai politik berkiprah menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal. Politisi Partai politik malah

dikenal masyarakat sebagai orang yang melakukan korupsi, mementingkan kelompok atau organisasi politiknya dan pejabat yang kurang peduli dengan kepentingan masyarakat (Kurnianto: 2016).

Berangkat dari permasalahan di atas, dapatlah dilihat bahwa eksistensi dan peran partai politik sangatlah menentukan keberlangsungan demokratisasi. Eksistensi dan peran partai tersebut salah satunya dapat dilihat melalui manajemen partai politik yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Efektivitas manajemen partai politik yang dijalankan, salah satu aspeknya dapat dilihat melalui proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Proses rekrutmen dan kaderisasi akan mempengaruhi manajemen partai politik tersebut. Baik buruknya manajemen partai politik akan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya yang diperoleh partai politik melalui proses rekrutmen dan kaderisasi anggotanya.

Salah satu pihak yang menilai banyaknya permasalahan tentang Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di Indonesia adalah kalangan intelektual, yaitu pemuda dan mahasiswa, Kalangan ini dinilai paling kritis terhadap kondisi politik Indonesia, termasuk tentang permasalahan rekrutmen dan kaderisasi partai politik. sehingga adanya model rekrutmen dan kaderisasi ini menarik untuk didiskusikan dalam konteks tataran perbandingan model rekrutmen dan kaderisasi partai politik dengan praktek yang dilakukan partai politik dalam proses rekrutmen dan kaderisasinya.

Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi ini perlu adanya model pembanding dalam rekrutmen dan kaderisasi organisasi kemasyarakatan yang selama ini dinilai baik dalam pengelolaan organisasinya, termasuk dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasinya. Salah satu organisasi kemasyarakatan yang menjadi model pembanding dalam proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). HMI merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang keanggotaannya identik dengan mahasiswa, sebagai salah satu kelompok pemuda yang

aktif berorganisasi di luar kampus. HMI juga dinilai memiliki kontribusi bagi pengisian anggota partai politik, tidak hanya salah satu partai politik namun aktivis HMI dapat diterima oleh hampir seluruh partai politik di Indonesia.

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Tim PPM bekerjasama dengan Tim KKN Integratif Virtual Unpad melakukan kegiatan Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di Indonesia, yang dalam pelaksanaannya juga mengundang narasumber yang memberikan sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi tentang Organisasi kemasyarakatan, khususnya HMI.

Adapun fokus pembahasan dari Pengabdian Pada Masyarakat di dalam tulisan ini adalah tentang:

Apa saja kegiatan Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di Indonesia Masa Reformasi?

METODE

Untuk mengatasi persoalan sebagaimana dikemukakan di bagian pendahuluan, maka Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di Indonesia Masa Reformasi merupakan salah satu 1 bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh Tim PPM-KKN Integratif Virtual Unpad.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di Indonesia Masa Reformasi ini meliputi:

1. Membentuk Tim Kelompok PPM dan Tim KKN-Integratif Virtual
2. Melakukan rapat-rapat kordinasi Tim untuk Menyusun Rancangan Kegiatan, mewawancara subyek PPM dan narasumber terkait permasalahan rekrutmen dan kaderisasi partai politik.
3. Melakukan pembagian tugas anggota Tim
4. Melaksanakan Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di Indonesia Masa Reformasi, baik di Media Sosial Instagram maupun dalam kegiatan webinar.

Realisasi Pemecahan Masalah

Untuk merealisasikan pemecahan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, dilakukan beberapa kegiatan sebagaimana roadmap Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di Indonesia Masa Reformasi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah tentang manajemen Partai Politik.
2. Merumuskan masalah rekrutmen dan kaderisasi sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi manajemen partai politik.
3. Melakukan pemetaan model rekrutmen dan kaderisasi partai politik berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan.
4. Melakukan Wawancara dengan subyek PPM-KKN Integratif Virtual dan Narasumber praktisi partai politik (dan organisasi kemasyarakatan) tentang permasalahan rekrutmen dan kaderisasi partai politik.
5. Menyusun rancangan kegiatan sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik (dan organisasi kemasyarakatan).
6. Melakukan pembagian tugas anggota Tim untuk kegiatan sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik (dan organisasi kemasyarakatan).
7. Melaksanakan kegiatan sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik (dan organisasi kemasyarakatan).
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Khalayak Sasaran

Sasaran subyek kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah anggota partai politik, dan juga masyarakat, terutama generasi muda yang tertarik untuk masuk dan bergabung ke dunia politik. Penentuan subyek ini dipilih supaya terpenuhinya kebutuhan dari masing-masing pihak, yakni anggota partai politik yang membutuhkan sarana untuk melakukan sosialisasi mengenai rekrutmen dan kaderisasi partai politik, juga terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mengetahui proses

rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik.

Metode dan Tahapan Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat dilakukan secara virtual, mengingat masih adanya pandemi Covid-19, dan juga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan level 4 di wilayah kediaman masing-masing anggota, selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) berlangsung. Oleh karenanya, seluruh pelaksanaan PPM, mulai dari mencari subyek PPM hingga pelaksanaan webinar dilakukan secara virtual, di kediaman masing-masing mahasiswa peserta PPM. Subyek PPM juga menyasar kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah kediaman mahasiswa peserta PPM.

Tahap pelaksanaan, terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu:

1. Tahap persiapan:

Koordinasi tim PPM: 8 Juli - 9 Juli 2021

Dimulai dengan pembagian tugas serta proyeksi narasumber yang akan menjadi pembicara dalam webinar.

Rancangan kegiatan: 10 Juli - 24 Juli 2021

Tahap ini disusun rancangan kegiatan yang akan dilakukan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang dirancang berupa kampanye melalui media sosial Instagram yang dilakukan oleh Tim PPM Mahasiswa dan webinar sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik serta Rekrutmen dan kaderisasi organisasi kemasyarakatan yang kegiatannya difasilitasi mahasiswa Tim KKN dan bekerjasama dengan Tim PPM.

2. Tahap pelaksanaan:

Pengumpulan data: 17 - 30 Juli 2021

Data yang dikumpulkan berupa informasi mengenai model rekrutmen dan kaderisasi dari beberapa partai politik, untuk mengetahui proses serta kendala dan solusi yang ada dalam tubuh suatu partai politik.

Penyiapan lapangan: 17 - 30 Juli 2021

Persiapan lapangan dimulai dengan menghubungi proyeksi narasumber dari

partai politik yang sekiranya akan menjadi pembicara dalam webinar dengan materi rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Setelah pembicara setuju untuk memberikan materi, Term of Reference (TOR) dikirimkan sebagai patokan bagi pembicara. Selain itu, pembuatan materi untuk konten kampanye media sosial juga dilakukan, untuk memberikan pengertian mengenai partai politik serta peran dan fungsinya melalui publikasi di Instagram.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: 3 Agustus 2021

Kegiatan PPM dilakukan dalam bentuk webinar dengan judul Sosialisasi Model Rekrutmen Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Pemberian materi sosialisasi diberikan oleh 6 pembicara, yakni 3 pembicara perwakilan tim dosen Universitas Padjadjaran, 1 pembicara perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan 2 pembicara perwakilan dari organisasi kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Webinar berlangsung selama kurang lebih 3 jam, dan dihadiri oleh lebih dari 70 peserta.

3. Tahap tindak lanjut:

Evaluasi tim PPM: 3 Agustus - 10 Agustus 2021

Pada tahapan ini dilakukan evaluasi untuk selanjutnya melakukan pembagian tugas dalam pembuatan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM), sekaligus evaluasi pelaksanaan webinar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ivancevich, rekrutmen adalah sekumpulan kegiatan organisasi yang digunakan untuk menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya (2007). Sementara itu rekrutmen politik merupakan sebuah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya (Cholisin dkk, 2007: 113). Berdasarkan pengertian di atas,

rekrutmen politik biasanya mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Surbakti, 1992: 118).

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik secara umum dan terhadap pemerintah secara khusus (Surbakti: 2010). Rekrutmen politik ini memiliki fungsi yang sangat penting dan sesuai dengan esensinya sebagai partai, yakni berfungsi untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, fungsi rekrutmen ini sangat penting adanya bagi kelangsungan Partai Politik.

Affan Gaffar (1999: 155), mengemukakan bahwa rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya, maka sekelompok orang digunakan untuk mengisi jabatan politik guna memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Sementara itu, menurut Czudnowski (Sigit Pamungkas, 2011), rekrutmen politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik secara aktif. Gabriel A. Almond (Lily Romli, 2005: 78) memberi pengertian terhadap rekrutmen politik sebagai penyeleksian masyarakat yang ditujukan untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan, yang dilakukan melalui penampilan dengan media komunikasi, menjadi anggota dari suatu organisasi, pencalonan terhadap jabatan tertentu, pendidikan, serta ujian.

Czudnowski (Fadillah Putra, 2007:103) mengemukakan beberapa jenis model yang digunakan partai politik dalam melakukan rekrutmen yaitu :

a. Rekrutmen Terbuka

Rekrutmen Terbuka merupakan salah satu model rekrutmen politik yang sifatnya lebih kompetitif, karena dalam model rekrutmen terbuka, memiliki prosedur yang membuat individu calon lebih dikenal secara luas, oleh karena itu, model ini memberikan

kesempatan kepada khalayak masyarakat untuk menilai sendiri kemampuan dan kapasitas calon. Dalam model rekrutmen terbuka, partai politik menjadi alat bagi elit politik untuk mendapatkan dorongan dan simpati dari masyarakat. Dalam konteks negara demokrasi, model ini berfungsi untuk menjadi media bagi masyarakat untuk mengontrol legitimasi yang dilakukan para elit politik.

b. Rekrutmen Tertutup

Model pola rekrutmen satu ini berbeda dengan model yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada pola rekrutmen tertutup partai politik berfungsi hanya menjadi sarana promosi atas aktor yang ada di dalam partainya sendiri. Rekrutmen tertutup berlawanan dengan rekrutmen terbuka, yang berarti disini proses rekrutmen tidak dapat diketahui secara luas dan bebas oleh masyarakat. Maka, model pola rekrutmen tertutup dapat dikatakan kurang kompetitif karena pelaksanaannya begitu tertutup serta menjadikan demokrasi hanya menjadi sarana para elit yang ingin memperbarui kekuasaan dan legitimasi tanpa diketahui prosesnya oleh masyarakat yang merupakan objek dari demokrasi itu sendiri.

Ada beberapa tahapan penting dalam perekrutan Calon Anggota Legislatif sebagaimana dikemukakan oleh Syamsudin Haris (2005:8), yaitu:

1. Penjaringan Calon

Tahapan berikut merupakan proses dimana elit partai tingkat desa, ranting atau setara, melakukan interaksi terhadap elit-elit partai pada tingkat cabang atau yang berada setara di atas tingkat ranting, yang bertujuan untuk menjaring bakal calon yang akan direkrut.

2. Penyaringan dan seleksi Calon yang telah dijaring

Pada Tahapan ini, interaksi berada pada elit tingkat cabang atau ranting, dengan elit tingkat daerah (Kabupaten/Kota).

3. Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon

Dalam tahapan ini, interaksi lebih intensif antara tim yang dibuat untuk menetapkan

Calon Anggota Legislatif dengan elit tingkat cabang atau daerah.

Pada tahapan- tahapan tersebut di atas, setiap *treatment* atau perlakuan yang dilakukan oleh partai politik yang melakukan rekrutmen, erat hubungannya dengan bagaimana partai politik tersebut mengorganisasikan dirinya. Artinya, pola-pola yang terjalin akan berbeda perwujudannya antara partai satu dengan partai yang lainnya. Pengelolaan partai yang baik, akan mewujudkan pola rekrutmen yang baik pula. Sedangkan mengenai pola rekrutmen, partai politik akan cenderung melakukan pola rekrutmen terbuka maupun pola rekrutmen tertutup dengan metode-metode tertentu yang digunakan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, setelah melalui proses rekrutmen, maka dilakukan kaderisasi. Istilah kaderisasi berasal dari kata “kader”, kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata *carde* yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan (Fattah, 2000: 54-56). Kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estapet dari suatu partai atau organisasi (Partanto dan Bahri, 1994: 293- 294). Dengan kata lain, kader diartikan sebagai orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi.

Kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin. Dalam hal ini dapat kita lihat perbedaan dari kaderisasi dan rekrutmen itu sendiri. Menurut Tead (dalam Kartono, 1994: 51), kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi.

Oleh karena itu, proses kaderisasi kepemimpinan ini lebih mengacu pada sebuah proses untuk menggerakkan sekumpulan orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan.

Secara umum ada 2 model kaderisasi politik (Haris, dkk, 2016: 54-55), yaitu:

a. Kaderisasi untuk Anggota Partai Politik

Pada umumnya partai politik melakukan proses kaderisasi untuk internal kadernya. Pada partai-partai moderen, anggota partai yang telah terdaftar yang membayar iuran keanggotaan secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara otomatis akan mendapatkan training tertentu oleh partai politik dengan tujuan tertentu pula. Kaderisasi anggota parpol di partai yang pelemagaan politiknya bagus dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan keluaran kader sesuai dengan visi dan misi parpol yang bersangkutan.

Selain itu, proses kaderisasi anggota parpol dilakukan secara sistematis, berjenjang dan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus. Namun di Indonesia, banyak partai politik yang melakukan proses kaderisasi secara insidental dan biasanya hanya diadakan pada waktu menjelang pemilu atau pilkada untuk kemenangan partai atau dalam kaitannya pembekalan calon anggota legislatif. Padahal proses kaderisasi yang bersifat ajeg dan terstruktur selain dapat membantu partai politik dalam meningkatkan kapasitas anggotanya juga menjadi alat untuk menilai potensi anggota-anggota partainya sekaligus parameter bagi parpol untuk melihat sejauh mana pelemagaan partai telah mengakar pada anggota-anggotanya.

b. Dalam Kaderisasi untuk Non Anggota Partai Politik Organisasi sayap partai menjadi sumber penting lainnya dalam kaderisasi partai politik. Melalui sayap partai internasionalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa,

organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan.

Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasa sekaligus menjadi perluasan basis dari parpol yang bersangkutan. Sebuah organisasi sayap atau underbow partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai. Proses kaderisasi yang bersifat ajeg dan terstruktur selain dapat membantu partai politik dalam meningkatkan kapasitas anggotanya juga menjadi alat untuk menilai potensi anggota-anggota partainya sekaligus parameter bagi parpol untuk melihat sejauh mana pelemagaan partai telah mengakar. Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasa sekaligus menjadi perluasan basis dari parpol.

Selain itu, dalam proses pelemagaan partai, relasi parpol dengan organisasi massa merupakan salah satu cara untuk memperluas jumlah basis massa dari segi sumber daya manusia dalam proses pengkaderan.

Untuk memberikan pemahaman dan wawasan dalam upaya memberikan edukasi politik bagi anggota parpol, anggota organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa, maka tim PPM melakukan sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik untuk dijadikan sebagai bahan asesmen, evaluasi serta masukan bagi pihak yang terkait, yang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Assessment

Sebelum melakukan kegiatan PPM yang terintegrasi dengan KKN Integratif Virtual, Tim PPM menugaskan anggota kelompok KKN-PPM Integratif untuk melakukan asesmen dengan anggota partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan yang berada di daerahnya masing-masing. Asesmen ini dilakukan guna mendapatkan data

kualitatif perihal pola rekrutmen dan kaderisasi yang dimiliki oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

b. Koordinasi Tim

Setelah melaksanakan asesmen kepada anggota partai politik dan organisasi kemasyarakatan perihal pola rekrutmen dan kaderisasi yang dimiliki oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di daerahnya masing-masing, Tim PPM melaksanakan koordinasi perihal bentuk kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam proses ini disepakati bahwa kegiatan PPM yang akan dilakukan terintegrasi dengan kegiatan KKN integratif Virtual-PPM Unpad yaitu dengan pembuatan akun sosial media sebagai wadah informasi dan sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan webinar sekaligus wadah sosialisasi perihal pola rekrutmen dan kaderisasi yang dimiliki oleh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia.

2. Pelaksanaan

a. Nama Kegiatan

1. Webinar “Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia
2. Pembuatan Media Sosial @kaderekutmen di instagram

b. Jenis Kegiatan

1. Webinar “Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia”:
2. Workshop: Pembuatan media sosial @kaderekutmen di instagram: Penyuluhan

c. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Tujuannya adalah:

- Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah masing-masing

- Memberikan pemahaman tentang model rekrutmen dan kaderisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan

Manfaatnya adalah:

- Adanya kedekatan mahasiswa Universitas Padjadjaran dengan masyarakat.
- Menambah pengalaman tentang dinamika rekrutmen dan kaderisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan
- Menambah pengetahuan tentang bagaimana cara menjadi kader dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan

d. Waktu Pelaksanaan

1. Webinar “Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia” dilaksanakan pada: Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 10.00-13.30
2. Pembuatan media sosial @kaderekrutmen di instagram 24 Juli-1 Agustus 2021

e. Pihak-Pihak yang Terlibat

1. Dr. Ratnia Solihah, S.IP., M.Si. (Ketua Tim PPM-KKN Integratif Virtual, juga sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Unpad)
2. Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si. (Anggota Tim PPM, juga sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad)
3. Ari Ganjar Herdiansah, S.Sos., M.Si., Ph.D. (Anggota Tim PPM, juga sebagai Ketua Pusat Studi Politik dan Demokrasi Unpad)
4. Rizkyansyah, S.IP., M.I.POL (Sekretaris Jenderal Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Partai Persatuan Pembangunan (PPP))
5. M. Fazrulzaman Azmi, S.Ipol., M.Si (Sekretaris Umum HMI Cabang

Jatinangor-Sumedang Periode 2018-2019)

6. Suci Fauzi Karenina (Ketua Umum KOHATI BADKO HMI Jawa Barat)
7. Armelin Yudianti (Anggota Banteng Muda Indonesia DPP Kota Bekasi)
8. Acep Ana, S.Ag (Anggota Dewan Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Fraksi PKB)
9. Mikhail Ghani Ar-Rasyid (Anggota DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP))
10. Badri Muhadi (Ketua DPC PKS Kota Baru)

f. Proses Pelaksanaan

1. Persiapan webinar

Pada tahapan ini, Tim PPM melakukan persiapan webinar berupa penyusunan *Term of Reference* dan juga mulai menghubungi pembicara.

2. Rilis konten sosial media

Dalam proses ini sosial media kelompok yang Bernama @kaderekrutmen mulai merilis konten seperti konten pengenalan hingga pencerdasan.

3. Wawancara dengan narasumber terkait

Masing-masing individu juga melakukan wawancara dengan tokoh partai politik atau organisasi kemasyarakatan di daerah masing-masing.

4. Pelaksanaan webinar

Pada tanggal 3 Agustus 2021, webinar dilaksanakan dengan menghadirkan 6 pembicara serta dihadiri oleh kurang lebih 70 peserta.

g. Hasil Capaian Kegiatan

1. Webinar “Sosialisasi Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia” Dilaksanakan dengan menghadirkan 6 pembicara serta dihadiri oleh kurang lebih 70 peserta.

2. Pembuatan media sosial @kaderekutmen di instagram
Konten media sosial selama kurang lebih 1 minggu

h. Rancangan Tindak Lanjut Hasil Kegiatan

Tindak lanjut dari kegiatan KKN-PPM Integratif ini adalah sosialisasi lanjutan kepada masyarakat luas melalui platform daring maupun luring.

3. Tindak Lanjut Kegiatan

1. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan

Dalam pelaksanaan kegiatan KKN-PPM Integratif ini yang dilakukan dalam dua bentuk kegiatan yaitu webinar dan pembentukan media sosial telah terjadi beberapa perubahan yaitu:

- Partisipasi masyarakat yang lebih meningkat
- Tingkat pemahaman peserta terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan
- Wadah informasi yang terintegrasi dalam media sosial @kaderekutmen.

2. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan

Permasalahan yang masih dirasakan terkait tema model rekrutmen dan kaderisasi partai politik di Indonesia ini adalah tingkat pemahaman masyarakat yang belum merata. Maka dari itu diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- Sosialisasi yang lebih luas melalui platform media sosial untuk menjangkau pengguna media sosial
- Sosialisasi secara langsung melalui penyuluhan untuk menjangkau masyarakat di berbagai daerah
- Kerjasama dengan berbagai partai politik dan organisasi kemasyarakatan

SIMPULAN

Proses rekrutmen dan kaderisasi merupakan bentuk keharusan yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi terutama partai politik. Secara fundamental partai politik memiliki

empat fungsi utama yaitu partai politik sebagai sarana komunikasi, rekrutmen, sosialisasi dan sarana pengatur konflik politik. Proses rekrutmen dan kaderisasi politik merupakan bentuk fungsi partai politik yang bertujuan untuk melanggengkan eksistensi partai dalam dunia politik. Proses kaderisasi merupakan proses penjarangan anggota partai politik yang sifatnya terbuka atas dasar persamaan cita-cita, tujuan dan orientasi politik yang sama untuk bergabung pada partai politik. Proses kaderisasi pada partai politik dilakukan berbeda-beda didasarkan pada jenis dan orientasi partai politik, sehingga pola kaderisasi yang dilakukan oleh partai kader seperti PDIP dan PKS tentu berbeda dengan proses kaderisasi partai lain.

Setiap orang yang telah mengikuti proses kaderisasi partai politik tentu akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai legitimasi keanggotaan partai politik tertentu. Setelah mengikuti proses kaderisasi, maka setiap orang resmi menjadi anggota partai dan selanjutnya akan dilakukan proses rekrutment sebagai bentuk proses penjarangan kader terbaik yang akan diusung partai politik untuk berkompetisi dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu). Proses rekrutmen politik setiap partai berbeda, dimana anggota partai yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif maupun Eksekutif perlu mengikuti proses rekrutment, dimana salah satu syaratnya adalah menjadi anggota partai aktif minimal dua tahun. Namun terdapat beberapa partai yang mengharuskan menjadi anggota partai aktif minimal lima tahun. Sebaliknya bagi calon yang memiliki popularitas dan elektabilitas, maka syarat minimal keanggotaan tidak berlaku dan malah ditawarkan menjadi caleg dari suatu partai politik secara instan dengan langsung memiliki KTA partai politik, dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki popularitas dan banyaknya pendukung, karena hal tersebut dapat menjadikannya sebagai salah 1 calon anggota legislatif yang memiliki peluang besar untuk dipilih. Begitu juga dalam upaya memenuhi syarat kuota 30% caleg perempuan, maka bagi kalangan perempuan yang dicalonkan suatu partai politik, umumnya

tidak disyaratkan dari lamanya keanggotaan & aktivitas keanggotaannya seperti caleg laki-laki, yang penting calon perempuan tersebut memiliki popularitas, kapasitas dan pendukung; serta adanya ijin dari keluarga untuk suatu partai politik tertentu.

Proses rekrutmen merupakan proses pembentukan sumber daya manusia berkualitas yang nantinya akan menjadi pemimpin politik dalam mengelola kehidupan sosial dengan berbagai sumber daya yang ada. Sehingga, dengan proses kaderisasi dan rekrutmen yang baik tentu akan menciptakan sumber daya politik yang baik dan mampu untuk mengelola kehidupan sosial dengan baik.

Dengan semakin meningkatnya partisipasi politik dari masyarakat khususnya generasi muda, tentu partai politik perlu melakukan sosialisasi politik sebagai bentuk memberikan edukasi politik. Adapun tujuan dari sosialisasi politik adalah untuk membentuk orientasi politik setiap orang yang nantinya akan dilakukan proses kaderisasi politik. Sehingga, dengan demikian setiap orang mampu paham dan mengerti mengenai mekanisme masuk menjadi keanggotaan partai politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada DRPM Unpad dan Dirdik Unpad yang telah memfasilitasi terselenggaranya PPM-KKN Virtual Integratif disertai bantuan hibah PPMnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, A. (2018). Survei LIPI: Demokrasi Kian Dipercaya, Parpol Makin Dijauhi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-lipi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi>
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, S dkk. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Pencegahan, Komisi

Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

- Haris, S. (2005). *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ivancevich, J. (2007). *Human Recourse Management*. Singapore: McGraw Hill.
- Kartono, K. (1994). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Kurnianto, F.(2016). Makna Kehadiran Politik. <https://nasional.kompas.com/read/2016/1/22/09235231/makna.kehadiran.partai.politik>
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Putra, F. (2007). Partai Politik dan Kebijakan Publik. In F. Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.